

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum**

#### **1. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang berdiri di Indonesia sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992. Bank Muamalat didirikan pada tahun 1991 yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sejak beroperasi pada tahun 1992, Bank Muamalat mulai melakukan inovasi-inovasi produk syariah meliputi asuransi syariah, dana pension lembaga keuangan muamalat.

Penghargaan mulai diperoleh oleh Bank Muamalat dengan memecahkan rekor Muri sebagai bank pertama yang menggunakan kartu debit syariah dengan teknologi chip di tahun 2011, selain itu juga sebagai bank yang menerbitkan surat utang syariah (sukuk subordinasi mudharabah) pertama di Indonesia. Sebelum mendapatkan penghargaan tersebut, di tahun 1994 Bank Muamalat terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan public yang belum *go public* dan juga sudah merupakan bank devisa.

Bank Muamalat telah memiliki sebanyak 325 kantor dengan 710 kartu anjungan tunai (ATM), 120000 ATM bersama dan ATM prima serta 21 kantor cabang di Malaysia dengan jaringan ATM lebih dari 11000 melalui *Malaysia Electronic Payment* (MEPS). Sampai sekarang

bank ini masih beroperasi dan masih mempertahankan eksistensinya di dunia perbankan nasional.

## **2. PT Bank Syariah Mandiri**

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang menjadi pelopor lahirnya bank-bank syariah di Indonesia serta keeksistensinya di dunia perbankan nasional, memunculkan bank syariah salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri yang berdiri tahun 1999 tepatnya setelah terjadinya krisis ekonomi moneter yang dirasakan bangsa Indonesia tahun 1998. Karena hal tersebut pemerintah mengambil tindakan dengan menata kembali dan melakukan rekapitalisasi beberapa bank yang terkena dampak dari krisis.

Bank Syariah Mandiri sendiri sebelumnya masih menjadi anak perusahaan PT. Bank Mandiri Tbk yang kemudian melakukan spin off dan menjadi Bank Umum Syariah. Berawal dari pemerintah yang memberi keputusan melakukan penyatuan dan mendirikan pengembangan mengenai merger yang berupa penggabungan bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Setelah ditetapkan UU No. 10 tahun 1998 mengenai sistem perbankan menggunakan dual banking system, PT Bank Susila Bakti (BSB) dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999 pada 25 Oktober 1999 dan beroperasi secara resmi Senin, 1 November 1999.

Dengan keeksistensiannya di dunia perbankan syariah nasional, Bank Syariah Mandiri mampu bersaing baik dengan bank-bank lain, hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan yang diperoleh, salah satunya yaitu Islamic Retail Banking Award tahun 2017 lalu, penghargaan Top Bank 2018 kategori top tabungan haji 2018.

Sebagai bank yang berasaskan prinsip syariah, maka bank syariah mandiri memiliki visi yaitu menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Bank syariah mandiri sendiri memberikan manfaat salah satunya dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana berupa modal usaha ataupun hanya untuk kegiatan konsumtif saja.

### **3. PT Bank BNI Syariah**

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia benar-benar memberikan dampak yang buruk untuk perekonomian nasional. Kegagalan dalam sistem perbankan membuat bank-bank besar terkhusus bank konvensional karena saat itu Indonesia lebih didominasi oleh bank konvensional. Setelah ditetapkan UU mengenai perbankan menggunakan *dual banking system* yaitu UU No. 10 tahun 1998, dibentuk Unit Usaha Syariah BNI pada 29 April 2000 dengan 5 kantor cabang di beberapa kota di Indonesia.

BNI syariah setelah sebelumnya hanya sebagai Unit Usaha Syariah, kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Gubernur BI dengan No. 12/41/KEP.GBI/2010, BNI Syariah melakukan spin off dari UUS

menjadi BUS pada 19 Juni 2010. Hal ini juga karena adanya faktor luar berupa regulasi dengan berlakunya UU No. 21 tahun 2008 sebagai pengganti UU No. 10 tahun 1998 serta terbitnya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pelaksanaan kegiatan operasionalnya, BNI syariah konsisten untuk memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan visi “menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Untuk layanan masyarakat, BNI Syariah membuat inovasi produk-produk berdasarkan prinsip syariah.

#### **4. PT Bank BCA Syariah**

Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang baik membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap ekonomi syariah maupun jasa perbankan syariah semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah serta adanya kepemilikan saham PT BCA Finance sebanyak 1 lembar.

Berdasarkan SK Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 terdapat konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah dan resmi beroperasi pada 5 April 2010 dengan nama BCA Syariah. Kegiatan

operasional bank berasakan prinsip-prinsip dan kepatuhan syariah. Visi bank sendiri menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat melalui program pengembangan SDM dan produk-produk layanan syariah.

## **5. PT Bank BRISyariah Tbk**

Bank BRISyariah merupakan bank yang sebelumnya adalah Bank Jasa Arta yang kemudian diakuisisi oleh PT Bank BRI (Persero) kemudian menjadi PT Bank BRISyariah sebagai Unit Usaha Syariah yang kegiatan operasionalnya semula konvensional berubah berdasarkan prinsip syariah. Dimana bank mulai resmi beroperasi pada 17 November 2008 melalui SK GBI No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008. Setelah mengalami perkembangan yang baik, kemudian bank melakukan spin off (pemisahan) dari Unit Usaha Syariah melebur ke dalam PT BRISyariah (Persero) menjadi Bank Umum Syariah berlaku mulai 1 Januari 2009.

BRISyariah Tbk memiliki tujuan untuk melayani nasabah sebaik mungkin dengan pelayanan prima serta mengeluarkan berbagai produk dan layanan sesuai dengan harapan nasabah dengan produk berlandaskan prinsip syariah. Fokus segmentasi pasar BRISyariah ini lebih masyarakat menengah bawah.

Berdasarkan sumber yang dilansir dari detikFinance bahwa BRISyariah mulai membuka sahamnya untuk umum dalam rangka *Initial Public Offering* (IPO), diktuip dari Direktur Utama BRISyariah, Moch.. Hadi Santoso “Tujuan IPO ini guna memperoleh tambahan dana dari

masyarakat yang akan digunakan Perseroan dalam pengembangan bisnis sekaligus memperkuat industri syariah di Tanah Air”.

## **6. PT Bank Mega Syariah**

Bank yang bermula bernama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) ini kemudian dikonversikan sebagai bank umum yang berprinsip syariah, bank yang berdiri pada 14 Juli 1990 ini diakuisisi oleh CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001 melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004.

Bank yang disingkat BMS ini memiliki komitmen dan bertanggung jawab secara penuh agar visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa” ini terealisasikan dan menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank terbaik di Indonesia, terbukti dengan melakukan penguatan modal bank. Dalam persaingan yang semakin kompetitif di industry perbankan ini, BMS dapat memberi pelayanan yang baik terhadap nasabah.

Disamping memberi pelayanan yang baik kepada para nasabah, BMS juga selalu menerapkan dan memegang teguh prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan profesionalisme dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Bank Mega Syariah juga mengembangkan berbagai produk dan jasa layanan syariah yang didukung dengan sejumlah kantor cabang di seluruh Indonesia. BMS mulai merambah pasar perbankan mikro dan gadai untuk memajukan serta menunmbuhkan perekonomian

umat yang lebih banyak melakukan usaha di sektor mikro dengan semboyan “untuk kita semua”.

## **7. PT Bank Victoria Syariah**

Bank yang bermula bernama PT. Bank Swaguna ini dibentuk berlandaskan perubahan 1967 Akta No. 9 pada 15 April 1966 menjadi Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 pada 5 September 1967. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) menurut SK No.JA.5/79/5 pada 7 November 1967.

Selanjutnya, pada 6 Agustus 2009 melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.5, PT Bank Swaguna telah mengubah namanya menjadi PT. Bank Victoria Syariah. Perubahan nama ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM melalui SK No. AHU-02731. AH. 01. 02 pada 19 Januari 2010 yang dimuat dalam Berita Negara RI No. 83. Selain perubahan nama, Bank Victoria syariah juga mengubah Anggaran Dasar dengan Surat No. AHU-Ah.01.10-16130 pada 29 Juni 2010.

Transformasi kegiatan usaha yang semula konvensional menjadi syariah telah memperoleh restu dari BI melalui SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 dan pada 1 April Bank Victoria Syariah mulai beroperasi sesuai dengan prinsip syariah serta mengembangkan produk-produk dan jasa layanan syariah.

## **8. PT Bank Jabar Banten Syariah**

Bermula dari Unit Usaha Syariah yang dibentuk oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada 20 Mei 2000, tujuan dari pendirian Bank Jabar Banten Syariah atau yang biasa disebut bjb syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang keinginannya menggunakan produk dan jasa layanan syariah mulai tumbuh pada saat itu.

Dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun, melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT. Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Memberi keputusan kepada Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Keputusan tersebut didasari oleh para pemegang saham yang berpandangan bahwa agar pertumbuhan usaha syariah mengalami percepatan dan program Bank Indonesia mengalami peningkatan *share* perbankan syariah, maka bank tersebut berkonversi menjadi BUS pada 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian No. 4 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU. 04317.AH. 01. 01 pada 26 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah.

Modal awal pendirian bank bjb syariah yaitu sebesar Rp.500.000.000.000 dengan PT. BPJB sebagai pemegang saham mayoritas yaitu 99% dan PT. Global Banten Development yaitu 1%. Pada tanggal 31 Juli 2012 bjb syariah sudah memiliki modal sebesar Rp. 609.000.000.000,- dengan komposisi PT. BJB Syariah, Tbk sebesar Rp. 595.000.000.000 dan PT BGD sebesar Rp. 14.000.000.000.

Selanjutnya, setelah bjb syariah telah melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana bank yang berdasarkan prinsip syariah, pada 19

Februari 2014 dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham terdapat perubahan Akta Pendirian sekaligus menjadi perubahan Akta yang terakhir. Perubahan tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH-04317.01.10-10438.

## **9. PT Bank Syariah Bukopin**

Bermula dari diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia yang merupakan bank konvensional karena masuknya konsorium oleh PT Bank Bukopin Tbk. yang dilakukan melalui proses yang cukup panjang dan bertahap sejak 2005 sampai 2008.

PT Bank Persyarikatan Indonesia yang mulanya bernama PT Bank Swarsindo Internasional yang didirikan pada 29 Juli 1990 berdasarkan Akta No. 102 melalui SK Menteri Keuangan No. 1.659/KMK.013/1990 yang kemudian berdasarkan SEBI No. 24/1/UPBD/PBD2/Smr mengenai Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank berganti dengan nama PT Bank Swarsindo Internasional pada tanggal 1 Mei 1991 dan menjadi bank umum.

Selanjutnya, Organisasi Muhammadiyah melakukan proses akuisisi terhadap bank tersebut dan sekaligus mengganti nama PT Swarsindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia serta mendapat persetujuan dari BI No. 5/4/KEP.DGS/2003 pada 24 Januari yang kemudian pada tanggal 31 Januari 2003 dituangkan dalam Akta No. 109.

Melalui penambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin Tbk., kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia merubah kegiatan

usaha yang awalnya beroperasi secara konvensional kemudian beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Perihal tersebut, kemudian mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui SK GBI NO. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah pada 27 Oktober 2008, dan perubahan tersebut secara resmi dan beroperasi efektif mulai tanggal 9 Desember 2008 dengan nama PT Bank Syariah Bukopin.

PT Bank Syariah Bukopin dalam eksistensinya di industry perbankan syariah telah memiliki berbagai jaringan kantor yaitu, 1 (satu) kantor pusat dan operasional, 11 (sebelas) kantor cabang, 7 (tujuh) kantor cabang pembantu, 4 (empat) kantor kas, 1 (satu) kantor unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) kantor layanan syariah, 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM termasuk Prima dan ATM Bank Bukopin. Bukopin syariah juga mengembangkan produk-produk dan jasa layanan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

#### **10. PT Bank Panin Dubai Syariah**

Bank Panin Dubai Syariah adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Bank ini mulai beroperasi pada 2 Desember 2009 yang memperoleh izin melalui SK GBI No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 yang diberikan oleh Bank Indonesia pada 6 Oktober 2009 sebagai bank umum yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Pendirian bank ini tidak melalui akuisisi maupun *spin off*.

Untuk menjaga keeksistensiannya di dunia perbankan Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah ini membuat inovasi-inovasi dengan cara mengeluarkan produk layanan keuangan yang inovatif dan komprehensif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan syariah.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Statistik Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Objek penelitian menggunakan Bank Umum Syariah yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah tahun 2012-2017 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun website resmi masing-masing bank. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan GCG dalam memprediksi *financial distress*. Variabel independen penelitian ini yaitu *Net Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Return On Assets*, *Capital Adequacy Ratio*, komisaris, direksi, dan komite audit, sedangkan variabel terikatnya yaitu *financial distress*.

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik/ciri dari kelompok suatu data. Statistik deskriptif ini menunjukkan nilai *mean* (rata-rata), nilai maksimum, dan nilai minimum, *range* (jarak), varians, standar deviasi. Hasil tersebut disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 4.2.1 Hasil Uji Statistik Data**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Periode	0						
NPF	240	22.03	.01	22.04	3.9887	3.30787	10.942
FDR	240	103.74	46.08	149.82	93.3199	11.11859	123.623
ROA	240	15.63	-10.77	4.86	.6935	1.78018	3.169
CAR	240	59.72	.00	59.72	18.9475	7.45116	55.520
FinDis	240	1	0	1	.16	.366	.134
Komisaris	240	3	3	6	3.93	.983	.966
Direksi	240	5	2	7	4.32	1.059	1.121
KA	240	7	2	9	3.77	1.311	1.719
Valid N (listwise)	240						

Sumber: Hasil Olah SPSS

Berdasarkan hasil tabel hasil olah data SPSS diatas, nilai N menunjukkan banyaknya data yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebanyak 240 data yang merupakan jumlah sampel selama periode penelitian dari tahun 2012 kuartal pertama sampai dengan kuartal keempat 2017. Untuk variabel *Non Performing Financing* memiliki nilai minimum 0,01%, nilai maksimum sebesar sebesar 22,04%, nilai rata-rata sebesar 3,9887%, *standar deviasi* sebesar 3,30787, varians 10,942, dan *range* 22,03. Untuk variabel FDR memiliki nilai minimum 46.08%, nilai maksimum sebesar sebesar 149,82%, nilai rata-rata sebesar 93,3199%, *standar deviasi* sebesar 11,11859, varians 123,623, dan *range* 103,74. Untuk variabel *Return on Assets* memiliki nilai minimum -10,77%, nilai maksimum sebesar sebesar 4,86%, nilai rata-rata sebesar 0,6935%, *standar deviasi* sebesar 1,78018, varians 3,169, dan *range* 15,63. Untuk variabel CAR memiliki nilai minimum 0,00%, nilai maksimum sebesar

59,72%, nilai rata-rata sebesar 18,9475%, *standar deviasi* sebesar 7,45116, varians 55,520, dan *range* 59,72.

Untuk variabel *financial distress* memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata sebesar 0,16, *standar deviasi* sebesar 0,366, varians 0,134 dan *range* 1. Untuk variabel komisaris memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum sebesar sebesar 6, nilai rata-rata sebesar 3,93, *standar deviasi* sebesar 0,983, varians 0,966, dan *range* 3. Untuk variabel direksi memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum sebesar 7, nilai rata-rata sebesar 4,32, *standar deviasi* sebesar 1,059, varians 1,121, dan *range* 5. Untuk variabel komite audit memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum sebesar 9, nilai rata-rata sebesar 3,77, *standar deviasi* sebesar 1,311, varians 1,719 dan *range* 7.

## **2. Uji Regresi Logistik**

Pengujian ini digunakan ketika jumlah dependennya lebih dari 1 kategori. Penelitian ini menggunakan model *binary logistic* yaitu dengan dua kategori, yaitu berpotensi *financial distress* (kode 1), sedangkan tidak berpotensi *financial distress* (kode 0). Jumlah data yang digunakan 240 dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 16. Hasil tersebut disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 4.2.2 Processing Summary**

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	240	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	240	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		240	100.0

Sumber: Hasil olah data SPSS

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada data yang hilang (*missing=0*), dan total data sebanyak 240.

**a. Menilai Model Fit**

Untuk menilai kelayakan model, perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis:

H0: Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H1: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Dari hipotesis di atas jelas bahwa H0 tidak boleh ditolah agar model fit dengan data. Untuk menguji hipotesis tersebut perlu dilakukan analisis terhadap nilai *-2Log Likelihood* pada blok pertama (*Block 0:Beginning Block*) dan blok kedua (*Block 1: Method = Enter*). Selain analisis terhadap nilai *-2Log Likelihood*, analisis terhadap *Hosmer and Lemeshow's Test* juga dapat dilakukan untuk menilai model fit. Sedangkan untuk menilai variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan olehvariabilitas variabel independen, dapat dilihat nilai *Cox and Snell's R Square* dan *Nagelkerke R Square*.

### 1. Uji Kelayakan (*goodness of fit*)

**Tabel 4.2.3 Hosmer and Lomeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.118	8	.846

Sumber: hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel diatas, pengujian menggunakan model fit diperoleh hasil *chi-square* sebesar 4.118. nilai tersebut  $>\alpha=0,05$ , dengan tingkat signifikansi sebesar 0,846 yang berarti tidak diperoleh adanya perbedaan antara estimasi model regresi dengan data observasinya, maka tidak perlu adanya modifikasi model.

### 2. Uji Overall Model Fit (nilai -2 likelihood)

**Tabel 1.2.4 Uji Overall Model Fit**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	212.875	-1.367
	2	209.734	-1.644
	3	209.710	-1.670
	4	209.710	-1.671

Sumber: Hasil olah dat SPSS

**Tabel 4.2.5 Hasil Uji -2 Likelihood**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients							
		Constant	NPF	FDR	ROA	CAR	Komisaris	Direksi	KA
Step 1	129.917	-4.212	.259	.024	-.161	.011	-.021	-.096	-.018
2	92.065	-7.612	.516	.046	-.307	.020	.001	-.148	-.050
3	73.775	-11.201	.830	.069	-.577	.030	-.031	-.120	-.112
4	67.593	-14.675	1.073	.097	-.904	.023	-.097	-.090	-.133
5	66.233	-17.403	1.227	.120	-1.153	.012	-.141	-.065	-.127
6	66.128	-18.455	1.282	.129	-1.240	.006	-.155	-.055	-.121
7	66.127	-18.559	1.288	.130	-1.248	.005	-.156	-.054	-.120
8	66.127	-18.560	1.288	.130	-1.248	.005	-.156	-.054	-.120

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 1, Nilai *-2 Log Likelihood* Block Number = 0 adalah sebesar 209,710. Setelah dimasukan ketujuh variabel independen, maka seperti yang terdapat pada tabel , Nilai *-2 Log Likelihood Block Number* = 1 mengalami penurunan menjadi sebesar -18,560. Penurunan *Likelihood* (-2LogL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang di hipotesiskan fit dengan data.

**Tabel 4.2.6 Omnibus Tests of Model Coefficients**

	Chi-square	df	Sig.
Step 1 Step	143.583	7	.000
Block	143.583	7	.000
Model	143.583	7	.000

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 4.2.6 diatas, hasil pengujian *omnibus test* diperoleh nilai *Chi-square* sebesar 143,583 dengan signifikasi sebesar 0,000. Dengan nilai signifikasi yang lebih kecil dari 0,05

dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama kondisi *financial distress* dapat diprediksi oleh variabel independen penelitian yaitu NPF, FDR, ROA, CAR, komisaris, direksi, dan komite audit.

**b. Nilai pseudo r-square**

**Tabel 4.2.7 Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	66.127 <sup>a</sup>	.450	.773

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 4.2.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cox and Snell's R Square* adalah sebesar 0,450 dan *Nagelkerke R Square* sebesar 0,773. Berarti ukuran *Cox & Snell* yang diperoleh bahwa 45% variasi kondisi *financial distress* dapat diprediksi menggunakan rasio NPF, FDR, CAR,ROA, komisaris, direksi, dan komite audit. Sedangkan menurut ukuran *Nagelkerke R Square* diperoleh 77,3% variasi kondisi *financial distress* dapat diprediksi menggunakan rasio NPF, FDR, CAR,ROA, komisaris, direksi, dan komite audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan variabilitas variabel independen adalah sebesar 77,3%. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 22,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

c. **Klasifikasi**

**Tabel 4.2.8 Klasifikakasi**

Observed	Predicted		
	FinDis		Percentage Correct
	0	1	
Step 1 FinDis 0	197	5	97.5
1	11	27	71.1
Overall Percentage			93.3

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, model regresi logistik mempunyai kemampuan menduga dari data asli sebesar 93,3% dengan tepat, sedangkan sisanya sebesar 6,7% salah duga. Kemampuan menduga dengan tepat pada kategori “*Financial Distress*” sebesar 71,1%, dan pada kategori “*Non Financial Distress*” sebesar 97,5%.

d. **Uji koefisien parsial (estimasi parameter)**

**Tabel 4.2.9 Koefisien Parsial**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step NPF	1.288	.284	20.572	1	.000	3.625	2.078	6.325
1 <sup>a</sup> FDR	.130	.048	7.223	1	.007	1.139	1.036	1.253
ROA	-1.248	.532	5.501	1	.019	.287	.101	.815
CAR	.005	.074	.004	1	.949	1.005	.870	1.160
Komisaris	-.156	.379	.169	1	.681	.856	.407	1.798
Direksi	-.054	.355	.023	1	.879	.948	.472	1.900
KA	-.120	.310	.151	1	.698	.887	.483	1.628
Constant	-18.560	5.552	11.175	1	.001	.000		

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel hasil pengujian diatas, menunjukkan bahwa hipotesis dari pengaruh variabel npf, fdr, roa, car, komisaris, direksi, dan koimite audit terhadap kondisi *financial distress* pada Bank Umum Syariah dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1.  $\alpha = -18,560$  artinya jika variabel NPF, FDR, ROA, CAR, komisaris, direksi, dan komite audit bernilai nol (0) maka akan menurunkan *financial distress* sebesar -18,56%.
2. NPF (*Net Performing Financing*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $<0,05$ , hal ini berarti NPF berpengaruh signifikan dan positif dalam memprediksi kondisi *financial distress*. **Ha diterima dan H0 ditolak.**
3. FDR memiliki koefisien bertanda positif dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,007, hal tersebut menunjukkan bahwa FDR berpengaruh dan positif dalam memprediksi kondisi *financial distress* pada Bank Umum Syariah. **Ha diterima dan H0 ditolak.**
4. ROA (*Return On Asset*) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,019 dan koefisien bertanda negatif dengan nilai -1,248, dengan demikian ROA berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif dalam memprediksi kondisi *financial distress*. **Ha diterima dan H0 ditolak.**
5. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,949, yang berarti rasio ini tidak berpengaruh dalam

memprediksi kondisi *financial distress*. **Ha ditolak dan H0 diterima.**

6. Komisaris memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,681 yang berarti bahwa komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*. **Ha ditolak dan H0 diterima.**
7. Direksi memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,879, hal ini menunjukkan bahwa jumlah direksi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. **Ha ditolak dan H0 diterima.**
8. Komite Audit memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,698 yang berarti rasio ini tidak berpengaruh dalam memprediksi *financial distress*. **Ha ditolak dan H0 diterima.**

Berdasarkan hasil pada tabel, maka dapat diperoleh persamaan untuk menginterpretasikan analisis regresi logistik, yaitu:

$$\ln \frac{p(\text{financial distress})}{p(\text{non financial distress})} = -18,560 + 1,288 \text{ NPF} + 0,130 \text{ FDR} - 1,248 \text{ ROA} + 0,005 \text{ CAR} - 0,156 \text{ Komisaris} - 0,054 \text{ Direksi} - 0,120 \text{ KA}$$

.Dari persamaan *logistic regression* diatas dapat dilihat bahwa *Log of Odds* bank mengalami *financial distress* berhubungan secara positif dengan NPF, FDR, CAR, Komite Audit.  $a = -18,560$  artinya jika variabel NPF, FDR, ROA, CAR, Komisaris, Direksi, dan Komite Audit bernilai signifikan yaitu 0.01, maka *financial distress* akan berkurang sebesar -18,560%.

Setiap kenaikan rasio NPF akan menaikkan *Log of Odds* bank mengalami *financial distress* = 1,794, FDR = 0,175, CAR = 0,052, dan Komite Audit = 0,173. Sedangkan, *Log of Odds* bank mengalami *financial distress* berhubungan secara negatif dengan variabel ROA, Komisaris, dan DPS. Kenaikan dari setiap variabel tersebut dapat menurunkan *Log of Odds*, yaitu ROA = -4,205, Komisaris = -0,439, DPS = -0,929.

### C. Pembahasan

Memprediksi *financial distress* dapat dilakukan dengan menilai tingkat kesehatan bank menggunakan kinerja keuangan bank maupun GCG. Peraturan OJK No.8/POJK.03/2014 menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menggunakan pendekatan RBBR (*Risk Based Bank Rating*) secara konsolidasi atau individu. Berdasarkan peraturan tersebut, RGEC menjadi metode untuk memprediksi *financial distress* pada penelitian ini, meliputi: *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Return On Assets*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *good corporate*.

#### 1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dalam memprediksi *financial distress*

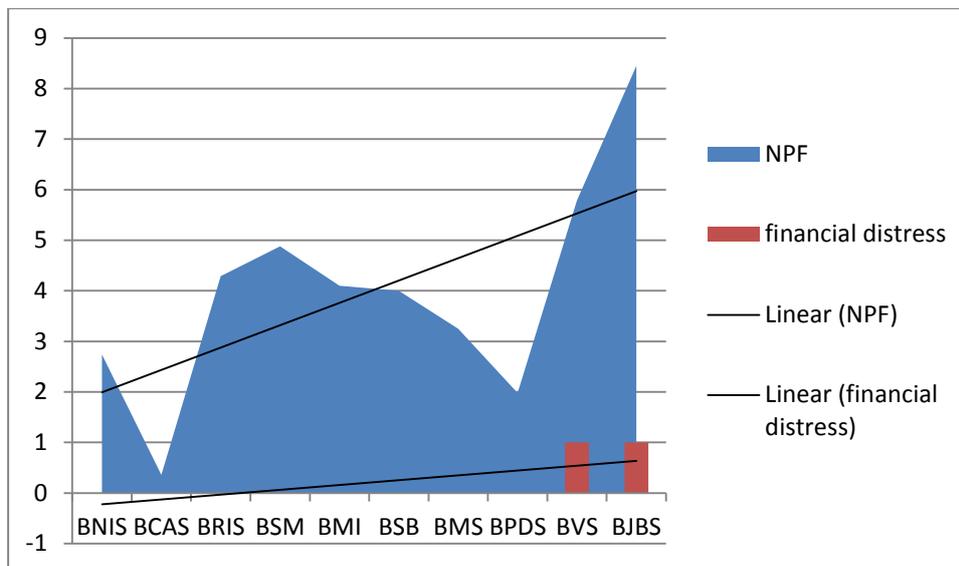
Hasil penelitian mengenai pengaruh *Non Performing financing* terhadap *financial distress* menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel NPF terhadap *financial distress* secara parsial. Nilai positif dalam hal ini dapat diartikan bahwa antara NPF dan *financial distress* memiliki hubungan yang searah. setiap

kenaikan dari variabel NPF diikuti dengan naiknya *financial distress*. Hal ini dikarenakan NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menangani atau menurunkan risiko pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini menguatkan asumsi bahwa akibat dari adanya NPF yang tinggi, maka kualitas pembiayaan bank akan semakin buruk kemudian bank akan mengalami kesulitan perputaran arus kas, hal tersebut dapat mengurangi laba yang diperoleh bank. Jika bank ingin terhindar dari *financial distress* maka bank harus memperhatikan kualitas aktiva produktif berdasarkan pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori.

Menurut Peraturan Bank Indonesia, batas maksimal nilai NPF suatu bank sebesar 5%, apabila nilainya melebihi 5% digolongkan sebagai bank yang kurang sehat hingga tidak sehat. Penelitian ini didukung oleh penelitian penelitian Chrisnanda Wisnu Pradana (2016), yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Dibawah ini grafik yang menjelaskan hubungan *Non Performing Financing* (NPF) dengan *financial distress*.



**Gambar 4.3.1 Grafik Kurva Trendline NPF Bank Umum Syariah**

Berdasarkan grafik diatas terlihat menunjukkan bahwa NPF dan *financial distress* memiliki trend naik. Namun, trendline NPF memiliki garis yang lebih curam dibandingkan dengan trend *financial distress* yang trendline nya lebih landai. Pertumbuhan NPF dari kesepuluh bank diatas mengalami kenaikan dari tahun 2012-2017. Terdapat 2 bank yang memiliki rata-rata nilai NPF diatas 5%, yaitu Bank Victoria Syariah (5,79%) dan Bank Jabar Banten Syariah (8,45%). Sedangkan, terdapat delapan bank memiliki rata-rata nilai NPF dibawah 5%, yaitu BNI Syariah (2,74%), BCA Syariah (0,36%), BRI Syariah (4,29%), Bank Syariah Mandiri (4,88%), Bank Muamalat Indonesia (4,10%), Bank Syariah Bukopin (4%), Bank Mega syariah (3,25%), dan Bank Bank Panin Dubai Syariah (1,98%). Tingginya rata-rata nilai NPF BVS yang mencapai 8,45% ini diakibatkan karena adanya lonjakan nilai NPF yang tinggi dimulai pada kuartal 2 tahun 2014 hingga kuartal 1 tahun 2017. Pada tahun 2014 kuartal 2 nilai NPF BVS sebesar 6,63%, kemudian terus

mengalami peningkatan hingga Maret 2015 menjadi 7,49%. Kemudian pada kuartal 2 tahun 2015 nilai NPF turun sebesar 5,03%. Namun, setelah itu nilai NPF nya kembali mengalami kenaikan sebesar 6,56% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 12,03% pada Juni 2016. Setelah mengalami kenaikan yang tinggi, pada kuartal 4 2016 nilai NPF kembali menurun sebesar 7,21%. Akan tetapi, kembali naik pada kuartal 1 tahun 2017 sebesar 8,92%. Setelah itu tahun 2017 kuartal ke-3 kembali menurun dan nilainya dibawah angka 5% sampai pada tahun 2017 kuartal ke-4 yaitu sebesar 4,59%. Untuk BJBS memiliki rata-rata nilai NPF sebesar 8,45% selama periode 2012-2017. Tingginya nilai NPF tersebut diakibatkan adanya kenaikan NPF secara terus menerus dimulai pada kuartal ke-3 tahun 2014 hingga kuartal ke-4 tahun 2017. Nilai NPF paling tinggi terjadi pada kuartal ke-4 tahun 2017 yaitu mencapai 22,04%. Nilai tersebut tergolong sangat tinggi. Pada tahun 2014 nilai NPF sebesar 6,90%. Kemudian pada Maret 2015 nilainya mengalami kenaikan sebesar 7,18%, kemudian menurun hingga kuartal ke-3 tahun 2016. Akan tetapi, pada Juni 2016 nilai NPF kembali naik sangat tinggi sebesar 17,09% dan nilai tersebut semakin naik hingga Desember 2017.

Bank Umum Syariah merupakan salah satu industri perbankan yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, sehingga perbankan syariah khususnya BUS perlu meningkatkan kualitas aktiva produktif yang baik agar pembiayaan yang tergolong bermasalah atau nilai NPF juga semakin menurun. Tingginya risiko ini dapat diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya dikarenakan

usahanya yang menurun, ketidakpastian kondisi ekonomi maupun bencana alam. Selain itu, pembiayaan bermasalah juga dapat diakibatkan dari adanya kesalahan bank dalam memberikan dananya kepada nasabah. Sehingga dalam hal ini bank harus melakukan pengawasan intensif dan pengendalian internal untuk mencegah risiko tersebut. Serta bank juga harus lebih selektif dalam menyalurkan dananya. Semakin sedikitnya pembiayaan bermasalah maka semakin kecil pula bank mengalami kondisi *financial distress* dan semakin bertambah laba atau profit yang diperoleh bank.

## **2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam memprediksi *financial distress***

Hasil penelitian mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *financial distress* menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel FDR terhadap *financial distress* secara parsial. Nilai positif dalam hal ini dapat diartikan bahwa antara FDR dan *financial distress* memiliki hubungan yang searah. setiap kenaikan dari variabel FDR diikuti dengan naiknya *financial distress*.

Hasil penelitian ini menguatkan asumsi bahwa jika bank memiliki nilai FDR yang tinggi hal tersebut dapat menyebabkan bank mengalami masalah kesulitan likuiditas sehingga bank tidak bisa membayar kewajiban jangka pendeknya. Bank memiliki risiko yang tinggi. Risiko tersebut tidak hanya diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya tetapi juga terdapat risiko likuiditas. Semakin

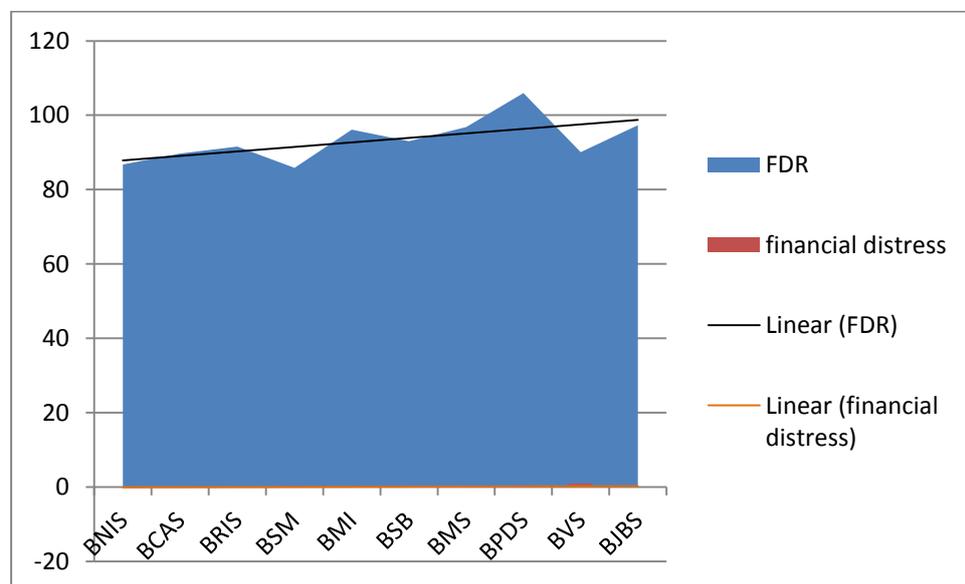
tinggi FDR menjelaskan bahwa semakin rendah likuiditas bank, hal ini dikarenakan FDR adalah rasio yang memperlihatkan likuiditas bank yang merupakan hasil bagi dari dana yang disalurkan dan dana yang berhasil dihimpun.

Dilihat dari data Bank Umum Syariah menurut Statistik Perbankan Indonesia rasio pembiayaan terhadap pendanaan (*Financing to Deposit Ratio*) bank syariah cenderung lebih tinggi dari bank konvensional yaitu berada pada kisaran 90%-98%. Artinya 100% dana yang dikumpulkan dari DPK, sebanyak 90%-98% di salurkan untuk pembiayaan. Tingginya rasio tersebut sangat efektif memberikan imbal hasil yang kompetitif sebab margin/hasil yang dihasilkan dari pembiayaan kepada debitur lebih tinggi dibanding jika dana tersebut ditempatkan pada instrument lain seperti pada fasilitas simpanan BI dan sukuk dan juga untuk mempercepat pertumbuhan bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia belum mengatur batasan maksimal FDR bagi perbankan syariah yang berarti bahwa OJK ataupun BI memperbolehkan FDR bank syariah berada pada level yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan fasilitas pasar keuangan syariah masih sedikit serta nasabah bank syariah lebih sedikit dari bank konvensional yang menyebabkan bank syariah harus lebih dulu mencari obek pembiayaan sebelum mencari dana pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/3/POJK/2014, menetapkan bahwa bank yang baik memiliki FDR sebesar <75% hingga

100%, apabila diatas 100% maka bank mengalami masalah likuiditas. Sedangkan jika nilainya dibawah 75%, maka likuiditasnya sangat baik tetapi dalam menyalurkan pembiayaan tergolong rendah. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori. Selain itu penelitian ini didukung oleh penelitian penelitian Chrisna, Ismawati (2015) yang mengatakan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas *financial distress*. Sedangkan hasil yang berbeda didapat dari penelitian Rahmania dan Hermanto (2014) yang mengatakan bahwasannya FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas *financial distress*.

Dibawah ini grafik yang menjelaskan hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *financial distress*.



**Gambar 4.3.2 Grafik Kurva Trendline FDR Bank Umum Syariah**

Berdasarkan grafik diatas terlihat menunjukkan bahwa FDR dan *financial distress* memiliki trend yang positif. Namun, trendline FDR memiliki garis yang lebih curam dibandingkan dengan trend *financial*

*distress* yang trendline nya lebih datar. Pertumbuhan FDR dari kesepuluh bank di atas mengalami kenaikan dari tahun 2012-2017. Terdapat 1 bank yang memiliki rata-rata nilai FDR di atas 100%, yaitu Bank Panin Dubai Syariah (105,96%). Sedangkan terdapat 9 bank memiliki rata-rata nilai FDR di bawah 100%, yaitu BNI Syariah (86,75%), BCA Syariah (89,69%), BRI Syariah (91,57%), Bank Syariah Mandiri (85,85%), Bank Muamalat Indonesia (96,12%), Bank Syariah Bukopin (93,01%), Bank Mega syariah (96,82%), Bank Victoria Syariah (90,07%) dan Bank Jabar Banten Syariah (97,32%). Tingginya rata-rata nilai FDR BPDS yang mencapai 105,96% ini diakibatkan karena adanya lonjakan nilai FDR yang tinggi dimulai pada awal periode 2012 sebesar 140,35%. Pertumbuhan nilai FDR BPDS mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, pada kuartal ke-2 tahun 2012 nilai FDR turun menjadi 127,88%. Akan tetapi pada kuartal ke-3 naik sebesar 149,82%. Kemudian kembali menurun menjadi 105,66%, pada kuartal ke-1 dan ke-2 tahun 2013 nilai FDR naik mencapai 120%. Setelah itu, nilai FDR turun di bawah 100% yaitu sebesar 90,4%, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014. Di kuartal ke-3 sebesar 140,97%. Setelah mengalami kenaikan, kuartal ke-4 tahun 2014 nilai FDR terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 pada level di bawah 100%. hingga kuartal 1 tahun 2017.

Bank Umum Syariah merupakan salah satu industri perbankan yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, sehingga perbankan syariah khususnya BUS perlu menjaga tingkat FDR pada kisaran 90%-

98% karena pada angka tersebut bank syariah memiliki tingkat likuiditas yang cukup aman dengan jumlah penyaluran pembiayaan yang besar. Selain itu, dengan adanya dana pihak ketiga yang terus tumbuh likuiditas bank akan tetap stabil.

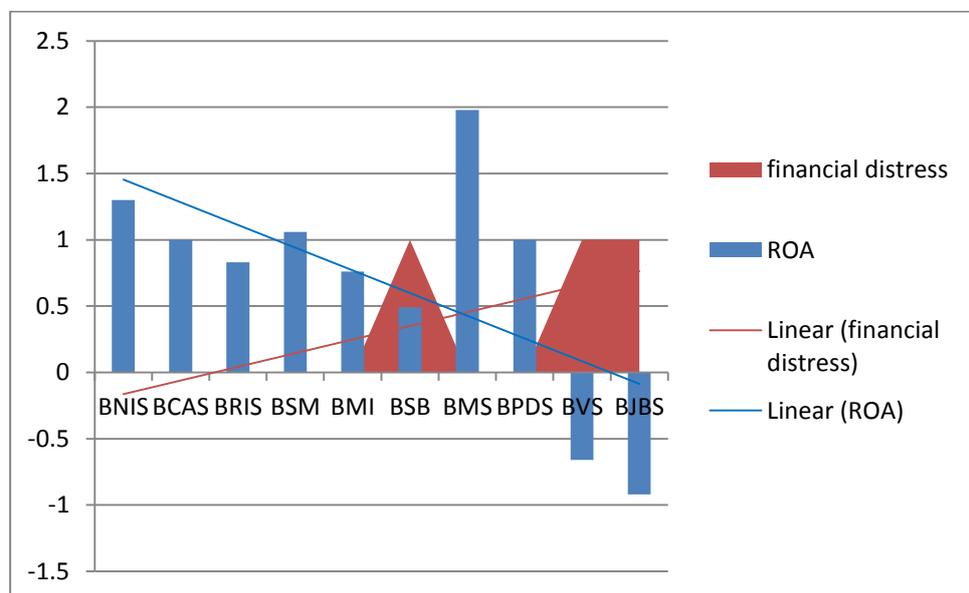
### **3. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) dalam memprediksi *financial distress***

Hasil penelitian mengenai pengaruh *Return On Asset* terhadap *financial distress* menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel ROA terhadap *financial distress* secara parsial. Nilai negatif dalam hal ini dapat diartikan bahwa antara ROA dan *financial distress* memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Setiap penurunan dari variabel ROA diikuti dengan naiknya *financial distress*. Hasil penelitian ini menguatkan asumsi bahwa nilai ROA tinggi akan meningkatkan profit. Implikasi dari adanya ROA yang terus mengalami kenaikan berarti dengan sumber daya yang dimiliki, bank mampu memaksimalkan sumber daya tersebut dengan baik. Jika bank ingin terhindar dari *financial distress* maka bank harus meningkatkan profitabilitas. Apabila bank tidak dapat menghasilkan laba atau keuntungan maka hal ini berdampak pada kegiatan operasional bank itu sendiri. Semakin tinggi nilai ROA menjelaskan bahwa semakin tinggi pula laba yang diperoleh bank, hal ini dikarenakan ROA adalah rasio yang memperlihatkan kemampuan bank dalam memperoleh laba dari

asset yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori.

Menurut peraturan Bank Indonesia, bank yang memiliki nilai ROA diatas 0,05% tergolong yang cukup sehat hingga sehat. Apabila dibawah 0,05% tergolong bank yang kurang sehat hingga tidak sehat. Hasil pengujian hipotesis ini di didukung oleh penelitian Rahmawati (2017), yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muamar Khadapi (2017), yang menyatakan bahawa ROA tdak berpengaruh dan negatif terhadap *financial distress*.

Dibawah ini grafik yang menjelaskan hubungan *Return On Assets* (ROA) dengan *financial distress*.



**Gambar 1.3.3 Grafik Kurva Trendline ROA Bank Umum Syariah**

Berdasarkan grafik diatas terlihat menunjukkan bahwa ROA dan *financial distress* memiliki trend yang saling bersinggungan. Trendline ROA memiliki garis yang menurun diabandingan dengan trend *financial*

*distress* yang trendline nya mengalami kenaikan. Pertumbuhan ROA dari kesepuluh bank diatas mengalami penurunan dari tahun 2012-2017. Terdapat 2 bank yang memiliki rata-rata nilai FDR dibawah 0% (negatif), yaitu Victoria Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Sedangkan BNI Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah memiliki rata-rata nilai ROA diatas 0,5%. Dan Bank Syariah Bukopin memiliki rata-rata ROA sebesar 0,49%. Rendahnya rata-rata nilai ROA BVS yang mencapai yang negatif ini diakibatkan karena adanya penurunan nilai selama beberapa periode. Pada kuartal ke-2 tahun 2014 nilai ROA memiliki nilai yang negatif sebesar -0,02. Pada tahun yang sama hingga tahun 2015 kuartal ke-1 nilai ROA BVS terus mengalami penurunan diangka negatif. Kemudian pada kuartal ke-2 tahun 2015 terjadi kenaikan paling tinggi selama periode 2012-2017 sebesar 1,37% setelah sebelumnya memiliki nilai -1,65%. Namun, setelah itu di tahun 2015 hingga Desember 2016 secara terus menerus BVS mengalami penurunan nilai ROA yang sangat drastis. Nilai ROA paling rendah terjadi pada tahun 2016 kuartal ke-3 sebesar -8,09. Berdasarkan grafik kurva diatas selain BVS yang memiliki nilai ROA negatif, BJBS juga mengalami nilai rata-rata negatif yaitu -0,922%. Penurunan nilai ROA paling tinggi terjadi pada tahun 2016 kuartal ke-4 yaitu sebesar -8,19%. Penurunan nilai ROA mulai pada Maret 2014 hingga Desember 2014. Setelah itu terjadi kenaikan pada kuartal ke-4 sampai kuartal ke-2 tahun 2015. Namun, setelah itu menalami penurunan sebesar -0,95. Pada Juni

2016 hingga Desember 2016 BJBS kembali mengalami penurunan nilai ROA hingga -8,09. Dan naik cukup tinggi menjadi 0,39 kemudian kembali menurun pada kuartal ke-2 hingga kuartal ke-4 tahun 2017 mencapai nilai negatif.

Bank Umum Syariah merupakan salah satu industri perbankan yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, sehingga perbankan syariah khususnya BUS perlu menjaga tingkat profitabilitas dengan cara meningkatkan penjualan produk bank. Serta bank perlu meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan karena sebagian besar laba diperoleh dari dana yang digunakan untuk pembiayaan. Semakin banyak pembiayaan yang diikuti dengan kinerja yang positif akan menghasilkan laba yang maksimal.

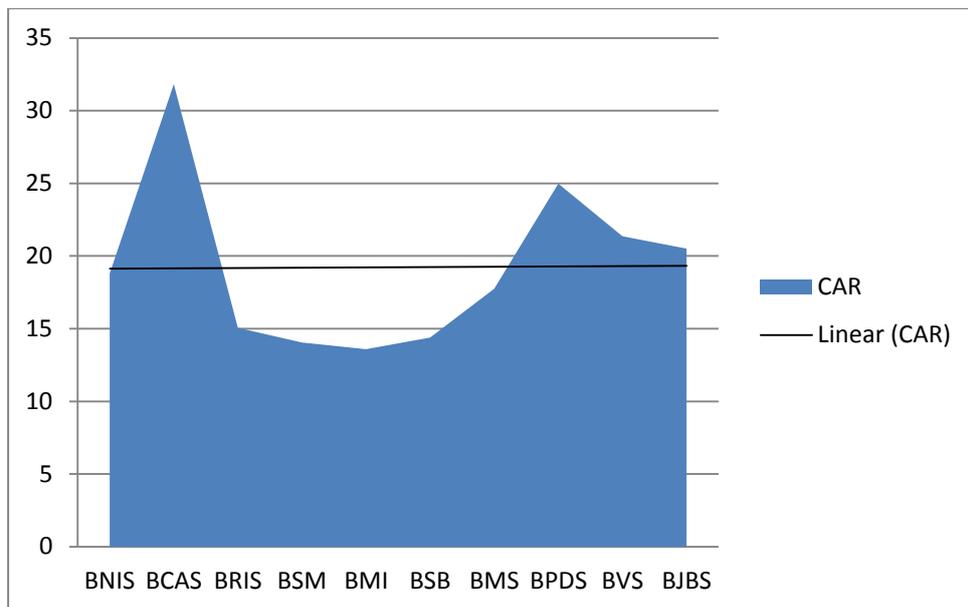
#### **4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam memprediksi *financial distress***

Hasil penelitian mengenai pengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* *financial distress* menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel CAR terhadap *financial distress* secara parsial. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan asumsi bahwa jika bank ingin terhindar dari *financial distress* maka bank harus meningkatkan modal yang dimiliki karena semakin tinggi modal artinya bank semakin mampu untuk menanggung risiko kerugian dari adanya berbagai pembiayaan yang mungkin berisiko. Nilai CAR yang tinggi juga akan mampu membiayai berbagai kegiatan operasional. Tidak berpengaruhnya CAR

terhadap *financial distress* diduga karena perbankan syariah konsisten menahan nilai CAR diangka yang relative tinggi sehingga secara statistik fluktuasi sudah tidak berkorelasi lagi dengan CAR. Berbeda kemungkinan apabila CAR dibawah nilai maksimum yang di tentukan oleh BI kemungkinan akan memiliki nilai yang fluktuatif sehingga akan mempengaruhi stabilitas. Sehingga dengan CAR yang baik bank syariah di Indonesia tahan terhadap guncangan.

Menurut peraturan Bank Indonesia, bank yang memiliki nilai CAR minimum sebesar 8%. Hasil penelitian yang mendukung peneitian ini adalah penelitian Chrisnanda Wisnu Pradana (2016), yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Muamar Khadapi (2017) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh dalam memprediksi *financial distress*.

Dibawah ini grafik yang menjelaskan hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan *financial distress*.



**Gambar 2.3.4 Grafik Kurva Trendline CAR Bank Umum Syariah**

Berdasarkan grafik diatas terlihat menunjukkan bahwa CAR dan *financial distress* memiliki trend datar. Pertumbuhan ROA dari kesepuluh bank diatas mengalami kenaikan yang sangat landai dari tahun 2012-2017. Keseluruhan bank yang menjadi objek penelitian memiliki nilai rata-rata CAR sebesar 19,03%. Artinya pertumbuhan CAR tersebut tergolong sangat baik. Rata-rata nilai CAR tertinggi periode 2012-2017 dari masing-masing bank dimiliki oleh BCAS sebesar 31,83%, BPDS sebesar 24,98%, BVS sebesar 21,36%, BJB sebesar 20,51%, BMS sebesar 17,75%, BNIS sebesar 16,8%, BRIS sebesar 15,06%, BSB sebesar 14,39%, BSM sebesar 14,05%, dan BMI sebesar 13,59%. BMI memiliki rata-rata nilai CAR paling rendah. Hal tersebut dapat diakibatkan karena nilai CAR yang tidak terlalu fluktuatif. Nilai CAR paling tinggi pada Maret 2014 sebesar 17,64%. Setelah itu nilai CAR mengalami penurunan hingga September 2017 menjadi 11,58%. Kemudian pada Desember 2017 nilai CAR kembali mengalami kenaikan

sebesar 13,62%. Sebaliknya, BCAS memiliki rata-rata nilai CAR paling tinggi selama periode 2012-2017. Hal tersebut dilihat dari pertumbuhan CAR pada Maret 2012 nilainya mencapai 44,5%. Setelah itu nilai CAR mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada kuartal ke-3 tahun 2013 hingga kuartal ke-3 tahun 2015 pertumbuhan CAR dibawah 30%. Setelah itu pada kuartal ke-4 tahun 2015 hingga kuartal ke-3 tahun 2017 nilai CAR kembali naik diatas angka 30%. Akan tetapi pada akhir tahun 2017 kuartal ke-4 nilai CAR mengalami penurunan menjadi 29,39%.

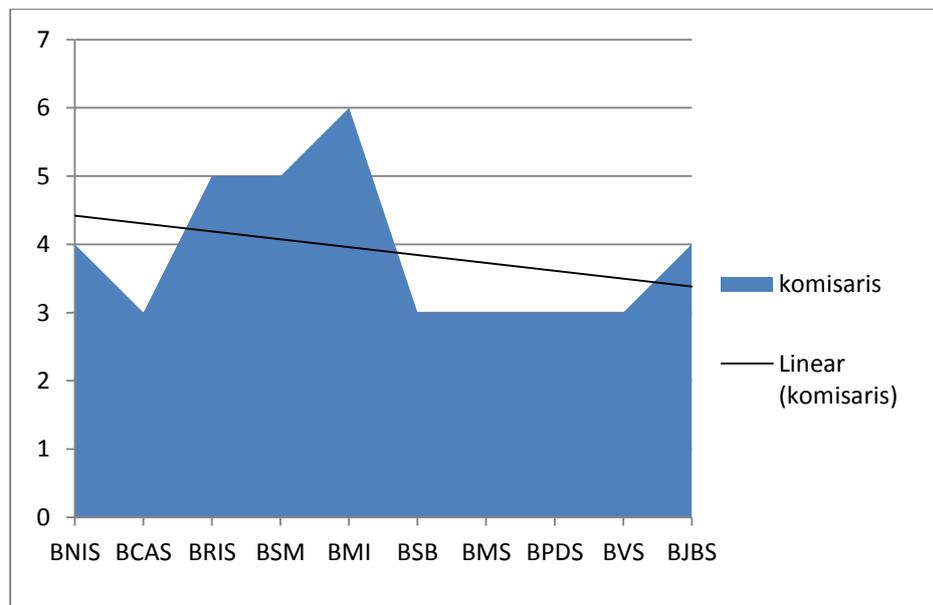
Bank Umum Syariah merupakan salah satu industri perbankan yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, sehingga perbankan syariah khususnya BUS perlu menjaga agar modal yang dimiliki tetap dalam kondisi yang tinggi, karena modal yang tinggi dapat menanggung risiko dari adanya pembiayaan yang berisiko dan dapat menutup kerugian akibat dari berbagai kegiatan perbankan serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada hal-hal yang berkaitan dengan profitabilitas.

## **5. Pengaruh Dewan Komisaris dalam memprediksi *financial distress***

Hasil penelitian mengenai pengaruh terhadap komisaris menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komisaris terhadap *financial distress* secara parsial. Artinya komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress* yang berarti variabel ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi gejala awal kebangkrutan bank. Tidak berpengaruhnya komisaris terhadap *financial distress* diduga

karena penyebab *financial distress* bukan berdasarkan seberapa jumlah komisaris melainkan dilihat dari bagaimana kinerja komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Hal tersebut dikarenakan jumlah komisaris cenderung tetap.

Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dianggap akan menyulitkan dalam melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan semakin kecil jumlah anggota dewan komisaris dianggap tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya. Disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Okta Kusanti (2015) yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Dibawah ini grafik yang menjelaskan hubungan komisaris dengan *financial distress*.



**Gambar 4.3.5 Grafik Kurva Trendline Komisaris Bank Umum Syariah**

Berdasarkan grafik diatas terlihat menunjukkan bahwa komisaris memiliki trend menurun. Kurva diatas merupakan rata-rata ukuran komisaris pada masing-masing objek dari tahun 2012-2017. Dapat dilihat bahwa ukuran jumlah komisaris tidak mempengaruhi kondisi *financial distress*. Berdasarkan grafik ukuran jumlah komisaris diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing bank memiliki perbedaan dalam menentukan berapa jumlah komisaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jumlah komisaris paling tinggi berjumlah 6 orang, dan paling rendah berjumlah 3 orang. BNI Syariah memiliki jumlah komisaris yang berbeda di awal periode tahun 2012-2014, di tahun 2012 jumlah komisaris terdiri dari 3 orang kemudian ditahun 2013 bertambah menjadi 4 orang. Di tahun 2014, jumlahnya kembali menjadi 3 orang, namun memasuki tahun 2015-2017 jumlah komisaris kembali menjadi 4 orang. BCAS dan BMS menerapkan ketentuan yang berbeda dengan menempatkan komisaris 3 orang selama periode 2012-2017. BRI Syariah menetapkan komisaris dengan jumlah 5 orang, akan tetapi di akhir periode 2017 BRIS mengganti dengan hanya 4 orang komisaris. BSM menerapkan cara yang sama dengan BCAS yaitu menetapkan komisaris dengan jumlah yang sama selama periode 2012-2017, yaitu 5 orang. Sedangkan, BMI juga menerapkan cara yang sama dengan BCAS perbedaanya hanya pada jumlah komisaris yaitu tahun 2012-2016 6 orang, di akhir periode 4 orang. Bank Syariah Bukopin memiliki komisaris berjumlah 3 orang di tahun 2012-2014, namun di tahun 2015-2017 menjadi 4 orang. Hal yang hampir sama dilakukan oleh BPDS

dengan menetapkan komisaris dengan jumlah 3 orang di tahun 2012-2015, sedangkan di tahun 2016 dan 2017 berjumlah 4 orang. Hal yang berbeda dilakukan oleh BVS dengan menetapkan komisaris berjumlah 3 orang di tahun 2012 dan 2013, di tahun 2014 menjadi 4 orang kemudian berganti menjadi 3 orang di tahun setelahnya sampai akhir periode 2017. BJBS melakukan cara yang sama dengan BMS, perbedaannya komisaris pada BJBS berjumlah 4 orang.

Untuk memaksimalkan kinerja komisaris terhadap tugasnya mengawasi para direksi dan komite, maka Bank Umum Syariah perlu memperhatikan ukuran jumlah anggota komisarisnya. Ukuran tersebut berdasarkan ukuran bank sesuai yang dibutuhkan. Karena ukuran yang sesuai dapat memaksimalkan kinerja komisaris itu sendiri.

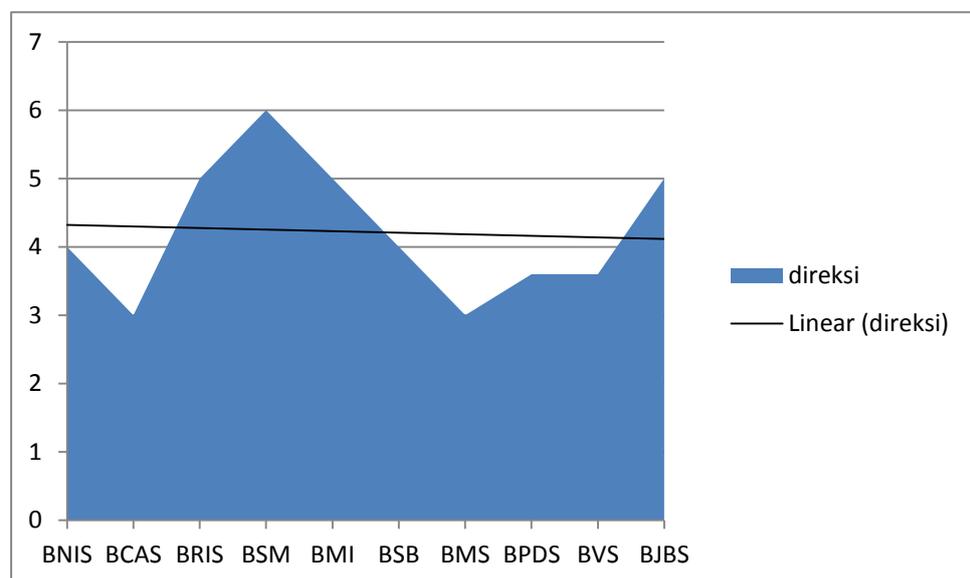
## **6. Pengaruh Direksi dalam memprediksi *financial distress***

Hasil penelitian mengenai pengaruh terhadap direksi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel direksi terhadap *financial distress* secara parsial. Artinya direksi tidak berpengaruh terhadap *financial distress* yang berarti variabel ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi gejala awal kebangkrutan bank. Tidak berpengaruhnya direksi terhadap *financial distress* diduga karena penyebab *financial distress* bukan berdasarkan seberapa jumlah direksi melainkan dilihat dari bagaimana kinerja direksi dalam mempertanggungjawabkan kewenangannya secara penuh terhadap

pengelolaan bank dan menyelenggarakan kegiatan operasional serta memelihara aset yang dimiliki oleh bank.

Semakin banyak jumlah anggota direksi dianggap akan menyulitkan dalam memberi keputusan strategik terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional bank. Sedangkan semakin kecil jumlah anggota direksi dianggap tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya. Disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kurniasari (2010) yang menyatakan bahwa direksi tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*.

Dibawah ini grafik yang menjelaskan hubungan komisaris terhadap *financial distress*.



**Gambar 4.3.6 Grafik Kurva Trendline Direksi Bank Umum Syariah**

Berdasarkan grafik diatas terlihat menunjukkan bahwa direksi memiliki trend menurun. Kurva diatas merupakan rata-rata ukuran direksi pada masing-masing objek dari tahun 2012-2017. Dapat dilihat bahwa ukuran jumlah direksi tidak mempengaruhi kondisi *financial distress*.

Berdasarkan grafik ukuran jumlah direksi diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing bank memiliki perbedaan dalam menentukan berapa jumlah direksi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jumlah direksi paling tinggi berjumlah 6 orang, dan paling rendah berjumlah 3 orang. BNI Syariah memiliki direksi berjumlah 3 orang di awal tahun 2012, kemudian di tahun 2013-2017 berjumlah 4 orang. Sebaliknya, BCAS di tahun 2012-2016 memiliki direksi berjumlah 3 orang, tetapi di akhir tahun 2017 bertambah menjadi 4 orang. BRIS memiliki direksi berjumlah 5 orang di tahun 2012-2013, namun di tahun 2014 berganti menjadi 4 orang. Kemudian di tahun 2015-2017 direksi BCAS kembali 5 berjumlah orang. Hal yang berbeda dilakukan oleh BSM yang memiliki jumlah direksi bervariasi, di awal tahun 2012-2013 direksi berjumlah 6 orang kemudian berubah menjadi 5 orang di tahun setelahnya sampai pada tahun 2015. Dan di tahun 2016-2017 BSM menetapkan direksi berjumlah 7 orang. Hal yang sama dilakukan oleh BMI dengan menetapkan direksi yang bervariasi selama periode tahun 2012-2017, tahun 2012-2014 direksi berjumlah 5 orang, tahun 2015 berjumlah 3 orang, kemudian di tahun 2016 6 orang. Dan di akhir tahun 2017 BMI menetapkan direksi dengan jumlah 7 orang. Di sisi lain BSB menetapkan direksi yang sama selama periode tahun 2012-2017 dengan jumlah 4 orang.

Bank Mega Syariah melakukan penetapan jumlah direksi yang berbeda di beberapa periode, tahun 2012 dan 2013 memiliki jumlah dewan direksi sebanyak 5 orang. Di tahun 2014 BMS mengurangi jumlah

anggota direksi menjadi 4 orang dan di tahun setelahnya yaitu 2015-2017 jumlah direksi menjadi 3 orang anggota. BPDS memiliki anggota direksi sebanyak 4 orang pada tahun 2012-2016, kemudian mengalami pengurangan jumlah anggota dengan hanya 2 orang direksi. BVS juga melakukan perubahan penetapan anggota direksi di beberapa periode, tahun 2012 berjumlah 3 orang lalu bertambah menjadi 4 orang di tahun 2013 dan 2014. Namun, di tahun 2015 BVS melakukan perubahan jumlah anggota menjadi 3 orang dan pada tahun 2016-2017 BVS kembali menetapkan jumlah anggota direksi sebanyak 4 orang. BJBS merupakan bank yang menetapkan jumlah direksi yang sama di setiap periode dari tahun 2012-2017 dengan anggota sebanyak 5 orang.

Untuk memaksimalkan kinerja direksi terhadap tugasnya, maka Bank Umum Syariah perlu memperhatikan ukuran jumlah anggota direksinya. Ukuran tersebut berdasarkan ukuran bank sesuai yang dibutuhkan. Karena ukuran yang sesuai dapat memaksimalkan kinerja direksi itu sendiri.

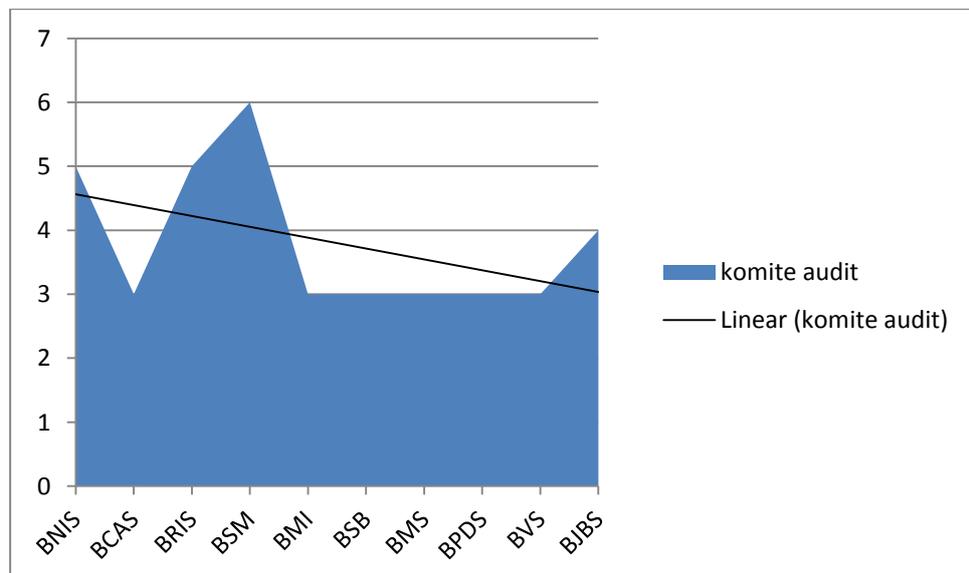
## **7. Pengaruh Komite Audit dalam memprediksi *financial distress***

Hasil penelitian mengenai pengaruh terhadap komite audit menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komite audit terhadap *financial distress* secara parsial. Artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress* yang berarti variabel ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi gejala awal kebangkrutan bank. Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap

*financial distress* diduga karena penyebab *financial distress* bukan berdasarkan seberapa jumlah komite audit melainkan dilihat dari bagaimana kinerja komite audit.

Semakin banyak jumlah anggota komite audit dianggap akan menyulitkan kesepekatan dalam melaksanakan kinerjanya. Sedangkan semakin kecil jumlah anggota komite audit dianggap kekurangan keberagaman ketrampilan dan pengetahuan sehingga menjadi tidak efektif. Disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Okta Kusanti (2015), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Dibawah ini grafik yang menjelaskan hubungan komite audit terhadap *financial distress*:



**Gambar 4.3.7 Grafik Kurva Trendline Komite Audit Bank Umum Syariah**

Berdasarkan grafik diatas terlihat menunjukkan bahwa komite audit memiliki trend menurun. Kurva diatas merupakan rata-rata ukuran komite audit pada masing-masing objek dari tahun 2012-2017. Dapat dilihat bahwa ukuran jumlah komite audit tidak mempengaruhi kondisi *financial distress*. Berdasarkan grafik ukuran jumlah komite audit diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing bank memiliki perbedaan dalam menentukan berapa jumlah komite audit dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jumlah komite audit paling tinggi berjumlah 9 orang yaitu pada BSM tahun 2016, dan paling rendah berjumlah 2 orang yaitu pada BMS tahun 2017. BNIS, BSM memiliki jumlah anggota komite audit rata-rata jumlah komite audit sebanyak 5 orang anggota pada tahun 2012 hingga 2017. BRIS, BSB, BMS, BPDS, dan BVS memiliki rata-rata jumlah anggota komite audit sebanyak 3 orang dari tahun 2012 hingga 2017. BJBS memiliki rata-rata jumlah audit sebanyak 4 orang. Sedangkan BSM memiliki rata-rata jumlah anggota komite audit sebanyak 6 orang dari tahun 2012 hingga 2017.

Untuk memaksimalkan kinerja komite audit terhadap tugasnya, maka Bank Umum Syariah perlu memperhatikan ukuran jumlah anggota komite auditnya. Ukuran tersebut berdasarkan ukuran bank sesuai yang dibutuhkan. Karena ukuran yang sesuai dapat memaksimalkan kinerja komite audit itu sendiri.